



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Parantritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta – telepon : (0274) 385323; 445271  
Faksimile : (0274) 415984 – E-mail : [yogya@bpkp.go.id](mailto:yogya@bpkp.go.id)

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Tulus Wahyana  
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Yusuf Ateh  
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Muhammad Yusuf Ateh

NIP [REDACTED]

[REDACTED]  
Slamet Tulus Wahyana

NIP [REDACTED]

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp	468.000.000
		1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp	779.000.000
		1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp	186.779.000.000
		1.4 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp	81.357.000.000
		1.5 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp	118.000.000
		1.6 Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rp	59.000.000
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target	PP	2
		2.2 Jumlah KP yang Diawasi	KP	7
		2.3 Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target	KP	7
		2.4 Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target	PSN	1
		2.5 Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	PLS	1
		2.6 Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil "Baik"	%	25
		2.7 Presentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	%	80
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya "Baik"	BUMN	1
		3.2 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	11
		3.3 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	1
		3.4 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	16
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian	4.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	%	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	%	75
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	12
		5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Pemda	12
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda	1
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda	2
		5.5 Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	%	1,11
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1
		5.7 Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	50,02
		5.8 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara memadai	Desa	57
		5.9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2
		5.10 Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	BLUD	2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	76
		6.2 Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	100
		6.3 Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100
		6.4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja	Skor	87
		6.6 Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu	%	91
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Laporan	100
		6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik
		6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	81
		6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3
		6.11 Indeks MR Unit Kerja	Nilai	Level 3
		6.12 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	SKor	76
		6.13 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	73

Kegiatan:

1 Pengawasan Pembangunan	Rp	1.029.816.000,00
2 Dukungan Manajemen	Rp	29.971.149.000,00
Jumlah	Rp	<u>31.000.965.000,00</u>

Kepala BPKP

Muhammad Yusuh Ateh  
NIP [REDACTED]

Jakarta, 10 Februari 2021

Kepala BPKP

[REDACTED]  
Slamet Tulus Wahyana  
NIP [REDACTED]